



KPK Minta Daerah Cegah Pungli di SPMB

JAKARTA—Dugaan pungutan liar (pungli) muncul dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang sudah dimulai di sejumlah daerah.

Stefani Yulindriani
redaksi@harianjogja.com

Dugaan pungli itu terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Menindaklanjuti

kasus tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan perlunya kebijakan untuk mencegah pungli dalam SPMB.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaga antirasuah mendorong hal tersebut sebab ditemukan sejumlah permasalahan korupsi pada sektor pendidikan, seperti penyuapan, pemerasan, ataupun gratifikasi dalam SPMB. "Kedua, kurangnya transparansi

kuota, dan persyaratan dalam PPDB atau SPMB sehingga membuka celah penyuapan, pemerasan, atau gratifikasi," ujar Budi saat di Jakarta, Senin (16/6).

Ketiga, penyalahgunaan jalur masuk peserta didik yang tidak sesuai, yakni terkait dengan prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua, hingga zonasi atau domisili.

► Untuk jalur afirmasi terdapat calon peserta didik yang dinilai mampu, tetapi masuk data tunggal sosial ekonomi nasional.

► Wamendikdasmen memastikan pihaknya tidak menemukan kasus pungli dalam SPMB yang digelar di Bandung.

► Halaman 10

KPK Minta...

"Sering kali terbit piagam-piagam palsu untuk dapat masuk jalur prestasi dan untuk prestasi, seperti tahfiz Al-Qur'an, hanya terbatas bagi pemeluk agama tertentu sehingga belum mengakomodasi seluruh pemeluk agama," katanya.

Untuk jalur afirmasi, kata dia, terdapat calon peserta didik yang dinilai mampu, tetapi masuk data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Sementara untuk perpindahan tugas orang tua baru mengakomodasi aparat sipil negara (ASN) dan pegawai badan usaha milik negara (BUMN), sedangkan orang tua yang bekerja di sektor swasta belum difasilitasi.

"Untuk zonasi, seringkali terjadi pemalsuan dokumen kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) atau melakukan perpindahan tempat tinggal sementara," ujarnya.

Permasalahan lain, kata Budi, adanya pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak sesuai peruntukan. Kemudian pertanggungjawaban dana BOS sering tidak disertai bukti. "Variabel penentuan BOS berdasarkan jumlah siswa, berjenjang dari sekolah meningkat sampai dengan ke Kementerian. Modus pelanggaran Dana BOS di antaranya kolaborasi antara pihak sekolah dan dinas terkait untuk mempermainkan jumlah siswa," jelasnya.

Temuan Pungli

Sebelumnya, Pemkot Bandung menyelidiki dugaan praktik pungli dalam proses SPMB yang nilainya diduga mencapai Rp8 juta per kursi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan nilai pungli yang terindikasi berada pada kisaran Rp5 juta hingga Rp8 juta per kursi. Meski demikian, ia belum dapat mengungkapkan nama sekolah maupun pihak-pihak yang terlibat karena proses penyelidikan masih berlangsung.

Farhan menegaskan pihaknya akan menindak tegas pelaku pungli, baik dari kalangan penerima maupun

pemberi suap, apabila ditemukan bukti yang cukup.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat memastikan pihaknya tidak menemukan kasus pungli dalam SPMB yang digelar di Bandung. Hal tersebut diungkapkannya dalam merespons adanya aduan masyarakat setempat terkait dengan adanya pungutan liar berupa jual-beli kursi sekolah dalam SPMB 2025.

"Kayaknya di Bandung itu enggak. Kami sudah mengecek," kata Atip singkat, saat ditemui di Jakarta, Senin.

Atip menjelaskan instansinya telah mengecek di lokasi terkait. Selain itu, Kemendikdasmen juga telah berkoordinasi lintas kementerian/ lembaga untuk memperkuat pengawasan.

Hal itu, ungkapnya, dilakukan untuk memastikan agar SPMB bisa berjalan secara transparan dan adil. "Kita sudah mengecek itu tidak terjadi. Tapi yang jelas kita sekarang sedang menurunkan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan, karena di dalam peraturan menteri yang sudah kita terbitkan itu berbagai pihak dilibatkan dalam pengawasan. Termasuk dari kejaksaaan, dari KPK dan lain sebagainya," ucap Atip Latipulhayat.

Daya Tampung

Di sisi lain, Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja, Mannarima, menuturkan tahun ini SMP negeri di Kota Jogja membuka pendaftaran dengan daya tampung bagi 3.456 siswa. Daya tampung tersebut terbagi dalam 16 sekolah.

Ia menuturkan penerimaan murid baru tahun ini akan terbagi dalam beberapa jalur. Jalur yang dibuka untuk SPMB jenjang SMP yaitu jalur domisili, afirmasi, mutasi orang tua/wali, dan prestasi.

Tahun ini kuota SPMB jenjang

SMP berbeda-beda untuk setiap jalur. Untuk jalur domisili radius kuota paling banyak 10% dari seluruh daya tampung SMP, dan domisili daerah paling sedikit 40% dari seluruh daya tampung SMP. "Pada SMPB ini tabel jarak untuk jalur domisili telah diperbarui sehingga lebih valid," katanya.

Dia mengaku bekerja sama dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Disptaru) Kota Jogja untuk memvalidasi jarak Rukun Warga (RW) rumah siswa dengan sekolah yang dituju. Ketika ada kesamaan jarak, seleksi akan berdasarkan urutan pilihan sekolah atau aktivasi akun lebih awal.

Kemudian, kuota untuk jalur afirmasi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) paling banyak 15% dari seluruh daya tampung SMP, dan afirmasi penyandang disabilitas paling banyak 5% dari seluruh daya tampung SMP. "Untuk peserta yang mendaftar jalur afirmasi KSJPS akan diterima semua. Karena berdasarkan data yang ada, daya tampung jalur tersebut lebih banyak daripada jumlah calon peserta didik yang tercatat dalam kepesertaan KSJPS," katanya.

Selain itu, dalam SPMB jenjang SMP juga ada kuota untuk jalur mutasi orang tua/wali 5% dari seluruh daya tampung SMP. Kemudian, ada pula kuota untuk jalur prestasi yang terdiri dari prestasi khusus paling banyak 5% dari seluruh daya tampung SMP, jalur prestasi umum paling banyak 10% dari seluruh daya tampung SMP, dan jalur prestasi akademik paling banyak 10% dari seluruh daya tampung SMP.

Dia menambahkan saat seleksi masih berlangsung, calon siswa dapat mengubah pilihan sekolah sampai batas waktu yang ditentukan masing-masing jalur yang didaftar. "Kami mengantisipasi soal salah pilih sekolah, padahal nilainya masih bisa bersaing kalau daftar di sekolah lain dengan jalur yang dipilih," katanya. (Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005